

Pemikiran Neo-Modernisme Perspektif KH. Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid Serta Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam Multikultural

Warso Hidayatullah,¹ Dedi Setiawan², Imam Syafe'i³ Tohir Muntoha⁴

^{1, 2, 3}) Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIM NU) Metro Lampung, Indonesia

³) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Indonesia

⁴) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Darul Ishlah, Tulang Bawang, Indonesia

 dedisetiawanpr@gmail.com

ABSTRAK

Studi ini berupaya menyingkap sebuah fenomena bangsa Indonesia sebagai negara yang memiliki berbagai macam keragaman, baik itu suku, budaya, adat istiadat, bahasa, maupun agama atau yang akrab dengan sebutan multikultural. Kenyataan tersebutlah yang pada akhirnya memunculkan pemikiran-pemikiran baru terutama dari tokoh-tokoh terkemuka seperti halnya Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Majid melalui gagasan-gagasan Neo-Modernismenya. Dalam studi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*LibraryResearch*), yaitu penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat dalam kepustakaan (buku) dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yaitu pencarian berupa fakta, hasil dan ide pemikiran seseorang melalui cara mencari, menganalisis, membuat interpretasi serta melakukan generalisasi terhadap hasil yang dilakukan.

KataKunci: Pemikiran Neo-Modernisme, KH. abdurrahman wahid, Nurcholis Madjid, Islam Multikultural.

A. Pendahuluan

Keragaman yang ada pada bangsa Indonesia di satu sisi merupakan suatu khazanah yang patut dipelihara dan memberikan dinamika bagi bangsa, namun di sisi lain dapat pula merupakan titik pangkal perselisihan dan konflik bagi masyarakat Indonesia (Zakiyuddin Baidhawiy 2005). Beberapa kasus yang pernah terjadi di tanah air yang diakibatkan oleh perbedaan sara tersebut di antaranya adalah konflik Ambon, Poso, dan konflik etnis Dayak dengan Madura di Sampit. Kasus-kasus yang disebutkan di atas sesungguhnya hanya beberapa di antara sekian kasus yang diketahui publik. Maka, menjadi keharusan bagi kita bersama untuk memikirkan upaya pemecahannya (*solution*). Termasuk pihak yang harus bertanggung jawab dalam hal ini adalah kalangan pendidikan.

Dari latar belakang masalah tersebut, selaknyalah kita mengembangkan paradigma baru yakni paradigma Islam multicultural. Paradigma Islam multukultural tersebut pada akhirnya bermuara pada terciptanya sikap umat yang mau memahami, menghormati, menghargai perbedaan budaya, etnis, agama dan lainnya tidak menjadi penghalang bagi terwujudnya sebuah persatuan dan

kesatuan di dalam berbangsa dan beragama. Dengan perbedaan manusia justru diharapkan tetap bersatu, tidak bercerai berai; mereka juga diharapkan menjalin kerja sama serta berlomba-lomba dalam kebaikan di kehidupan yang sangat kompetitif (Choirul Mahfud 2016).

Berbagai persoalan yang ada telah membuat beberapa tokoh di Indonesia maupun dunia menawarkan pemikiran-pemikiran Neo-Modernisme, yaitu pemikiran yang menggabungkan dua faktor penting yaitu modernisme dan tradisionalisme. Dalam hal ini Kh. Abdurrahman Wahid atau yang akrab di panggil Gus Dur adalah salah satu tokoh yang peduli akan tegaknya multikulturalisme, baik ditengah-tengah masyarakat, kalangan politik, budaya, lebih-lebih dalam konteks pendidikan agama Islam. Banyak tokoh yang telah mencatat hasil pemikiran Gus Dur terkait dengan hal tersebut, dengan alasan karena beliau sangat terbuka terhadap konsep multikultural yang berusaha mengakomodir segala perbedaan dengan selalu hidup berdampingan secara damai. Hal tersebut beliau lakukan tidak hanya menggunakan hasil pemikiran Islam tradisional saja, namun lebih pada penggunaan metodologi teori hukum (ushul al-fiqh) dan kaidah-kaidah hukum (qawaid fiqhiyah), serta pemikiran kesarjanaaan Barat dalam kerangka pembuatan suatu sintesis untuk melahirkan gagasan baru sebagai upaya menjawab perubahan-perubahan aktual.

Sedangkan Nurcholis Madjid atau yang lebih akrab di kenal dengan sebutan Cak Nur mengemukakan bahwa gagasan multikultural adalah pendidikan yang menyatukan seluruh efek efektif, kognisi, dan juga psikomotor yang kesemuanya itu di simbolisasikan dalam pelaksanaan ibadah rukun Islam. Cak Nur merupakan tokoh yang mempunyai pemikiran keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan yang mengandung nilai-nilai multikultural yang perlu di kaji agar dapat memberi wawasan bagi para Sarjana.

Cak Nur mengatakan bahwa suatu generasi tidak akan bisa secara total untuk memulai pembaharuan dari nol, melainkan harus bersedia bertaqlid. Ini berarti harus melakukan dan memanfaatkan peroses akumulasi pemikiran-pemikiran masa lalu. Karena pemikiran-pemikiran masa lalu tersebut tidak hanya sekedar di hargai, tetapi sekaligus harus di hadapi secara kritis agar melahirkan pemikiran-pemikiran kreatif di masa mendatang. Tanpa adanya penghargaan terhadap warisan pemikiran dan keilmuan klasik, maka peroses pemikiran multikultural tidak akan terjadi. Karna pemikiran multikultural itu berusaha menyatukan pemikiran klasik dan pemikiran moderen, sehingga tahap pengembangannya semakin luas sesuai dengan subtansi yang meliputinya.

B. Metode

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*LibraryResearch*), yaitu penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat dalam kepustakaan (Suharini Arikunto 1995). Isi studi kepustakaan dapat berbentuk kajian teoretis yang pembahasannya difokuskan pada informasi sekitar permasalahan penelitian yang hendak

dipecahkan melalui penelitian (Sukardi 2015). Dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yaitu pencarian berupa fakta, hasil dan ide pemikiran seseorang melalui cara mencari, menganalisis, membuat interpretasi serta melakukan generalisasi terhadap hasil yang dilakukan (Munzir 1990).

Studi teks menurut Noeng Muhadjir mencakup; Pertama, telaah teoritik atau disiplin ilmu yang perlu dilanjutkan empirik untuk memperoleh kebenaran secara empirik pula. Kedua, studi yang berupaya mempelajari seluruh substansi objek penelitian secara filosofis atau teoritik dan terkait dengan validitas. Ketiga, studi yang berupaya mempelajari teori linguistik. Keempat, adalah studi sastra (Noeng Muhadjir 1996). Dengan kata lain Penelitian ini banyak menggunakan sumber dari dokumen tertulis dalam proses pengumpulan datanya. Data didapat dengan penelusuran sumber-sumber berupa buku-buku, jurnal, dan majalah. Di samping itu juga penulis menggunakan penelusuran melalui situs internet dan diskusi yang terkait dengan kajian tesis ini, juga mencatat sumber-sumber yang digunakan penelitian sebelumnya (Kuntowijoyo 1995). Penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian historis-faktual (Anton Bakker 1984) karena meneliti tokoh dan pemikirannya.

Penelusuran sejarah pemikiran pendidikan dikalangan umat Islam memang amat diperlukan. Karena hal ini setidaknya bisa mengingatkan kembali khazanah intelektual yang pernah dimiliki oleh umat Islam dimasa lalu. Kesadaran historis ini pada gilirannya akan memelihara kesinambungan atau kontinuitas keilmuan khususnya dalam kajian tentang pendidikan Islam. Dengan demikian, pengembangan pemikiran pendidikan Islam yang ada sekarang ini tidak harus tercerabut dari akar historisnya (Abdul Munif 2004).

C. Pemikiran Neo-Modernisme KH. Abdurrahman Wahid

Pemikiran Gus Dur banyak dipengaruhi oleh apa yang dibaca dan dipelajarinya karena keduanya memberikan kesempatan kepada dirinya untuk mencoba menyintesis pemikiran Barat modern dengan Islam (Greg Barton 2010). Mengupas pemikiran Gus Dur penting dilakukan, sebab hingga kini masyarakat Muslim Indonesia pada umumnya banyak yang belum memahami pemikirannya secara utuh. Sementara ini yang terlihat hanyalah kontroversialnya, tanpa memahami ide dasar dari pemikiran dan tujuan substansial dari gagasan-gagasan yang dikemukakan.

Di samping itu, tidak jarang ditemui pemahaman pemikiran Gus Dur hanya sepotong-sepotong. Disadari memang tidaklah mudah merumuskan pokok-pokok pikiran Gus Dur karena tulisannya tersebar di berbagai media massa dan ditulis secara singkat dalam waktu yang berlainan. Kesulitan demikian diakui sendiri oleh Gus Dur dalam pengantarnya di dalam dua bukunya yang berjudul *Bunga Rampai Pesantren* (1978) dan *Muslim di Tengah Pergumulan* (1981). Ia menyadari betapa sukarnya mengumpulkan tulisan-tulisan itu dalam sebuah tema dan susunan yang utuh. Menurut Greg Berton, peneliti tulisan-tulisan Gus Dur dari Australia, pengakuan Gus Dur tersebut merupakan ekspresi dari kenyataan yang ada, bahwa kedua bukunya itu memuat sejumlah artikel

yang ditulis untuk maksud serta audiens yang berbeda. Meski demikian, bukan berarti pemikiran Gus Dur tidak memiliki tema pokok yang dapat memayungi sebagai sebuah tawaran pemikiran alternatif (Abdurrahman Wahid 1981).

Latar belakang Gus Dur yang bukan dari ‘tradisi akademik’ (sekolah modern) di mana suatu tulisan mesti terikat dengan suatu metodologi dan referensi formal, maka Gus Dur dapat dikategorikan sebagai seorang intelektual bebas (independen), atau meminjam istilah Gramsci “intelektual organik”. Dalam hal ini, tradisi akademik pesantren yang lebih kental, sehingga tulisan-tulisannya cenderung reflektif, membumi, terkait dengan penghayatan realitas bahkan senantiasa bermotifkan transformatif. Referensi formal akademis dan pengikatan diri terhadap metodologi tidaklah penting, terpenting substansi yang disampaikan. Terdapat dua pemikiran pokok yang secara langsung maupun tidak langsung telah mewarnai karya-karya yang ada:

1. Pribumisasi Islam

Pribumisasi Islam yang dipaparkan oleh Gus Dur bukanlah jwanisasi atau singkretisme (Budhy Munawar-Rachman 2016), sebab pribumisasi Islam hanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal di dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa menambah hukum itu sendiri. Namun juga bukan meninggalkan norma demi budaya, akan tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan dari budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman nas, dengan tetap memberikan peranan dalam ushul fikih dan kaidah fikih (Budhy Munawar-Rachman 2016).

Dengan demikian pribumisasi Islam merupakan jawaban atas problema yang dihadapi umat Islam sepanjang sejarah dengan berusaha mempertemukan budaya (*'adah*) dengan norma (*syari'ah*), yang menjadi persoalan dalam ushul fiqh (Tim INCRS 2000). Oleh sebab itu, harus ada akomodasi atau rekonsiliasi melalui proses yang dilakukan secara alami, bukan paksaan yang akan menjadikan konsep pribumisasi Islam terwujud dan tercapai (Abdurrahman Wahid 1989). Berkaitan dengan ide pribumisasi Islam, Gus Dur berargumen bahwa agama Islam dan budaya mempunyai independensi masing-masing, akan tetapi keduanya mempunyai wilayah yang tumpang tindih. Agama Islam bersumberkan wahyu dan memiliki normanya sendiri. Karena bersifat normatif, maka ia cenderung permanen, sedangkan budaya adalah buatan manusia, karena ia berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan cenderung untuk selalu berubah. Perbedaan ini tidak menghalangi kemungkinan manifestasi kehidupan beragama dalam bentuk budaya. Di sinilah adanya akomodasi atau rekonsiliasi. Proses itu harus dilakukan secara alami, bukan terpaksa dan itulah terjadinya pribumisasi (Abdurrahman Wahid 1989).

Hal-hal yang dipribumisasikan berupa manifestasi kebudayaan Islam belaka. Bukan ajaran yang menyangkut inti keimanan dan peribadatan formal. Islam tetap Islam di mana saja berada. Namun tidak berarti semua harus disamakan bentuk luarnya (Majalah Tempo edisi 23 April 1984). Dalam proses, pembauran Islam dengan budaya tidak boleh terjadi, sebab berbaur berarti hilangnya sifat-sifat asli. Islam harus tetap pada sifat Islamnya.

Misalkan Al-Quran harus tetap dalam bahasa Arab, terutama dalam shalat, sebab hal ini telah merupakan norma. Sedangkan terjemahan Al-Quran hanyalah untuk mempermudah pemahaman, bukan menggantikan Al-Quran. Untuk kasus Jawa, misalnya, pribumisasi bukanlah penjawaan atau sinkretisasi, sebab pribumisasi Islam hanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal dalam merumuskan hukum-hukum agama tanpa mengubah hukum itu sendiri. Juga bukannya meninggalkan norma demi budaya, tetapi agar norma itu menampung kebutuhan-kebutuhan budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman nash, dengan tetap memberikan peranan kepada ushul fiqh dan kaidah fiqh.

Pada konteks ini Gus Dur menegaskan bahwa multikultural telah diakui di dalam kitab suci al-Qur'an secara tegas mendeklarasikan bahwa pluralitas masyarakat baik dari segi agama, etnis, warna kulit, bangsa, merupakan kehendak Allah SWT (Sunnatullah). Karena itu upaya penyeragaman dan berbagai bentuk hegemonisasi yang lain, termasuk dalam hal pemahaman dan implementasi ajaran agama, merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat dasar Al-Qur'an yang menjadi alat uji kualitas keberagamaan seseorang (M. Hanif Dhakiri 2010).

Berhubungan dengan masalah pribumisasi, Gus Dur bertutur bahwa saya tetap mengimbu agar kita menghargai budaya melalui sebuah upaya pribumisasi Islam. Oleh sebab itu, perkembangan Islam sesuai dengan zaman dan cenderung selalu berkembang mengikuti arus jaman sehingga tidak menghalangi kemungkinan untuk melakukan manifestasi kehidupan beragama dalam bentuk budaya maka dalam hal, kalau budaya tidak dikaitkan dengan agama, yang pastinya budaya hancur begitupula sebaliknya (Abdurrahman Wahid 2001).

2. Prinsip-Prinsip Humanisme dan Pluralitas Masyarakat

Di dalam prinsip humanisme dan pluralitas masyarakat adalah demokrasi, karena demokrasi merupakan suatu keharusan untuk tidak boleh dilupakan dan diabaikan karena menyangkut tentang kemanusiaan. Kemanusiaan ini tidak dapat diabaikan karena hakekatnya dari demokrasi yang menempatkan manusia sebagai subjek demokrasi itu sendiri.

Gus Dur mengatakan bahwa, mulai sekarang ini sebenarnya kita telah dituntut untuk bersedia bersama dalam memperjuangkan kebebasan dan menyempurnakan demokrasi yang hidup di negeri kita. Maka perjuangan itu mengharuskan untuk bersedia menumbuhkan moralitas baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu bermoralitas serta merasa terlibat dengan penderitaan masyarakat kelas bawah, atau orang terpinggirkan (Abdurrahman Wahid 2016). Namun

ketika beliau berkeinginan untuk menampilkan esensi-esensi agama Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang plural, justru beliau termasuk orang yang sangat berkomitmen terhadap agama yang dianutnya (Abdurrahman Wahid 1995). Pandangan humanitarianisme Gus Dur tertanam kuat dari pemahamannya terhadap Islam. Seluruh karyanya, terutama esai, menjelaskan betapa Gus Dur meyakini benar bahwa ekspresi Islam paling benar hanya dapat diraih ketika ‘semangat hukum’, hakikat, dijadikan hal yang paling utama dari pada yang tersurat dalam hukum.

Menurut Berton, keyakinan ini dekat sekali dengan dua tema lainnya yaitu rasionalitas dan pendirian bahwa melalui usaha-usaha rasional yang terus menerus Islam akan lebih dari sekadar mampu menghadapi tantangan modernitas. Terlebih lagi, Gus Dur berpandangan bahwa justru humanitarianisme Islamlah-menyangkut ajaran Islam tentang toleransi dan keharmonisan sosial-yang mendorong seorang Muslim tidak seharusnya takut kepada pluralitas yang ada dalam masyarakat modern, sebaliknya harus meresponnya dengan positif (Greg Berton 1995).

Pandangan Gus Dur yang pluralis tercermin dengan halus beragam dalam tulisan-tulisannya. Keluasan visi dan keterbukaan sikapnya merupakan salah satu segi pandangan pluralis tersebut. Itu semua ditunjukkan oleh keluasan bacaannya serta hasratnya untuk senantiasa terbuka bagi pemikiran yang datang dari berbagai latar belakang maupun pendirian mana pun. Sikap pluralis Gus Dur ditunjukkan oleh gairahnya yang besar pada perubahan yang demokratis, kebebasan berbicara dan nilai-nilai liberal pada umumnya.

Pemikiran Gus Dur bersumber dari kegelisahannya melihat realitas agama yang hanya sekadar menjadi suplemen dalam kehidupan beragama. Agama hanya dijadikan retorika dan jargon yang tidak memiliki sumbangan yang konkrit, fungsional, progresif pada perubahan sosial. Karena kehidupan beragama masih bersifat suplemen, maka penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dalam kehidupan sangat kecil, kedaulatan hukum hampir tidak ditegakkan, kebebasan berbicara dan berpendapat hanya mendapat ruanggerak yang sempit. Hal ini tidak akan terjadi bila agama berfungsi sebagai komplementer bagi faktor lain dalam kehidupan sosial, terutama dalam proses pembangunan, karena pada hakikatnya agama adalah penghormatan yang tinggi kepada derajat kemanusiaan yang sebenarnya.

D. Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholis Majid

Gerakan Neomodernisme memperoleh ketenaran secara mengesankan setelah keluarnya statement Cak Nur dalam seminar tunggal pada bulan Januari 1970 yang intinya menengarai tanda-tanda hampir matinya pemikiran kaum pembaru, sehingga perlu dilakukan pembaruan pemikiran. Cak Nur pada waktu itu menggunakan terma desakralisasi dan sekularisasi dalam papernya sehingga dengan mudah menyulut kritik bernada kemarahan dari berbagai pihak. Kritik itu terutama datang dari tokoh-tokoh modernis senior yang terusik oleh kritikan Cak Nur yang mengatakan bahwa gerakan intelektual para senior telah mandek dan perlu direformasi. Para modernis senior

ini menuduh pemikiran Cak Nur sebagai kecenderungan bid'ah (Greg Barton 1999). Berbagai kritikan ini justru membuat popularitas pemikiran Cak Nur semakin meningkat (Zubaedi 2007).

Bisa dikatakan, munculnya gerakan pembaruan yang berporos pada Cak Nur telah menandai permulaan face penyebaran ide pembaruan dalam komunitas umat Islam, juga penyebaran ide-ide pembaruan dan kecenderungan pemahaman liberal dalam Islam. Gagasan ini dalam perkembangannya diterima secara luas oleh masyarakat Indonesia dan mampu mengubah sikap-sikap sosial yang cukup mendasar. Berkaitan dengan persoalan pembaharuan Islam, Nurcholish Madjid telah menawarkan suatu bentuk neo-modernisme Islam:

1. Prinsip Dasar Pembaharuan Pemikiran Islam

Kerangka pemikiran pembaharuan Cak Nur bersandar pada pemahaman yang radikal terhadap dua prinsip dasar Islam, konsep tauhid dan gagasan bahwa manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Menurut Cak Nur, dari dua prinsip dasar Islam tersebut dapat dirumuskan premis-premis teologisnya yang menegaskan bahwa hanya Allah yang memiliki transendensi dan kebenaran yang mutlak. Sebagai konsekuensi dari penerimaan terhadap prinsip monoteistik, maka sudah seharusnya kaum Muslim memandang dunia dan masalahnya yang temporal (sosial, budaya dan politik) seperti apa adanya.

Memandang dunia dan semua yang ada di dalamnya dengan cara yang sakral dan transendental secara teologis dapat dianggap bertentangan dengan inti paham monoteisme Islam (Nurcholis Madjid 2007). Dalam tulisannya, *Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Ummat*, yang berisi konsep 'sekularisasi', menurutnya kaum Muslimin Indonesia mengalami kemunduran dalam pemikiran keagamaan dan telah kehilangan 'kekuatan daya gebrak psikologis' (*psychological striking force*) dalam perjuangan mereka. Indikasi penting dari kemandegan itu adalah ketidakmampuan mayoritas Muslim untuk membedakan antara nilai transendental dengan nilai temporal. Bahkan ia menunjukkan lebih jauh bahwa hierarki nilai itu sering kali diperlakukan terbalik: nilai yang transendental dipahami sebagai nilai yang temporal, dan sebaliknya. Akibat cara keberagamaan seperti itu, Islam dipandang sebagai senilai dengan tradisi, dan menjadi Islamis sederajat dengan menjadi tradisional.

Menurutnya, umat Islam menghadapi pilihan kritis: jalan pembaharuan yang menuntut pemikiran kembali secara teliti akan makna agama di dalam dunia modern dengan pengorbanan solidaritas umat, atau memelihara solidaritas itu dengan pengorbanan pemikiran yang beku, dan kehilangan kekuatan moral. Cak Nur menawarkan suatu proses liberalisasi yang pada gilirannya mempunyai tiga dimensi yaitu sekularisasi, kebebasan intelektual, dan fikiran yang maju (*idea of progress*) serta keterbukaan.

Menurut Cak Nur, sekularisasi tidaklah dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme dan meng-ubah kaum Muslimin menjadi sekularis, tetapi dimaksudkan untuk menduniawikan nilai-nilai

yang sudah semestinya bersifat duniawi, dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk mengukhrawikannya. Sekularisasi dimaksudkan untuk lebih memantapkan tugas duniawi manusia sebagai khalifah Allah di bumi, yang berfungsi memberi ruang kebebasan untuk berkreativitas dalam rangka perbaikan hidup dan menghidupkan kembali fungsi ijtihad.

Gagasan-gagasan ini teraplikasi juga dalam bidang politik. Menurut Cak Nur, kebutuhan pokok kaum Muslim bukan bentuk negara, tetapi moral dan karakter perilaku politik mereka. Kesetiaan Muslim bukan terletak pada institusi, tetapi pada Islam sendiri. Cak Nur banyak mengungkap tentang nilai Islam yang dipandangnya universal seperti demokrasi, pluralisme, egalitarianisme, dan keadilan social. Dalam konteks Indonesia, Cak Nur menawarkan jargon “Islam Yes, Partai Islam No.” (Nurcholis Madjid 1992).

Dalam hal ini, Cak Nur menolak konsep negara Islam seperti yang pernah diperjuangkan Masyumi, karena hal tersebut telah menimbulkan pemahaman agama yang bersifat ideologis-politis ketimbang substansialis, bahkan pada tingkat tertentu telah menjadikan negara atau partai Islam sangat identik dengan Islam itu sendiri, dan hal ini sangat bertolak belakang dengan prinsip tauhid. Gagasan ‘sekularisasi’ Cak Nur, yang dalam pengertian substantifnya menghasilkan penolakan terhadap partai Islam dan konsep negara Islam menjadi isu sentral dan kontroversial pada awal tahun 1970-an. Hal ini disebabkan karena terma sekularisasi dipahami sebagai sesuatu yang membentuk sesuatu yang non-religius atau sama seperti dunia sekuler, meskipun ada penyangkalan dari Cak Nur secara eksplisit. Banyak kaum modernis menolak melepaskan semboyan bahwa Islam adalah satu agama yang holistik yang tidak mengenal pemisahan antara masalah-masalah ketuhanan dari masalah-masalah kemanusiaan dan dalam Islam tidak ada pemisahan antara gereja dan negara (H.M. Rasyidi 1973).

2. Islam dan Problem Modernitas

Cak Nur, salah satu cendekiawan Muslim, terlibat dalam sebuah perdebatan dengan sejumlah ‘intelektual sekular’ di Indonesia mengenai modernisasi (R. William Liddle 1997). Dalam pandangannya, tampak jelas bahwa pesan-pesan di balik retorika modernisasi sebagaimana dikemukakan oleh para intelektual sekular pada awal orde baru adalah memperkecil untuk tidak mengatakan anti terhadap nilai-nilai keagamaan. Menurut Cak Nur, beberapa di antara mereka juga ada yang mengejek azan dengan menggunakan pengeras suara sebagai ‘teror elektronik’.

Dalam perdebatan ini, ia menegaskan bahwa modernisasi bukanlah penerapan sekularisme, dan bukan pula menggunakan nilai-nilai kebudayaan Barat. Bagi Cak Nur, modernisasi adalah rasionalisasi. Ia mencakup suatu proses pemeriksaan yang sangat teliti terhadap pemikiran ketinggalan zaman dan pola tindakan yang tidak rasional dan menggantikannya dengan yang rasional. Bagi seorang Muslim, menurut Cak Nur, modernisasi merupakan suatu keharusan-bahkan suatu kewajiban mutlak.

Untuk mendukung pendapatnya, Cak Nur mengilustrasikan kesaksian Einstein mengenai apa yang merupakan pusat dari religiusitas yang sebenarnya. Orang-orang sekuler menawarkan rasionalisme sebagai pendekatan pemecahan masalah dunia. Hal ini berasal dari konsep berpikir mereka bahwa manusia tanpa dibantu petunjuk Ilahi mampu memecahkan masalah duniawinya dengan bantuan akal. Islam menuntut dipergunakannya akal, tetapi penggunaan akal hanya mampu mengantarkan manusia menuju kebenaran relatif, sedangkan kebenaran absolut hanya dapat diperoleh melalui wahyu.

Cak Nur mengutip Einstein yang menyatakan bahwa keseluruhan pengetahuan mengenai alam semesta hanyalah dari kesan-kesan yang dikemukakan oleh akal pikiran yang tidak sempurna, membuat mencari kenyataan itu adalah kebenaran yang nampaknya tidak bisa diharapkan. Agaknya, karena kesadaran mengenai keterbatasan akal pikiran inilah, Einstein memasuki alam keinsyafan keagamaan yang mendalam. Di dalam menjelaskan gagasannya mengenai modernisme di dalam segala dimensinya yang luas, Cak Nur sering kali mengutip ayat-ayat Al-Qur'an yang bernuansa pluraritas sebagai basis argumentasinya. Di samping itu dengan sangat lugas, Cak Nur memaknai Islam sebagai sikap pasrah sempurna kepada Allah yang berada pada garis kelanjutan dengan agama-agama lain (Nurcholis Majid 2003).

E. Analisis Neo-Modernisme Terhadap Islam Multikultural dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid

Adanya keragaman budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama tertentu merupakan suatu harapan akan perdamaian dalam hidup berdampingan dalam bingkai perbedaan. Hal tersebut terjadi dan tumbuh subur di negeri yang bernama Indonesia, suatu negeri yang dihuni dengan skat-skot, mulai dari keyakinan (agama), tradisi, suku, dan bahasa yang digunakan sehari-hari (Faisol 2011). Dengan melihat realitas sosial yang terus berkembang dan berevolusi, khususnya di Indonesia yang mayoritas berpenduduk Muslim mempunyai potensi yang kuat tentang suatu keragaman, seharusnya terdapat sebuah sistem dalam berkehidupan beragama yang berbasis multikultural supaya mampu mengakomodasi potensi yang ada sebagai salah satu kekayaan bangsa.

Oleh karena itu sangatlah penting adanya pemikiran-pemikiran Islam yang berbasis multikultural sebagai tawaran pemikiran solutif guna meminimalisasi berbagai tindakan kriminalitas yang mengatasnamakan agama, suku dan tindakan-tindakan radikal yang kurang bertanggung jawab. Dengan demikian, kesatuan umat mampu tercapai dalam bingkai perbedaan, dan tidak sertamerta umat yang satu dengan lainnya dengan mudah *truth claim* sebagai landasan pembenaran terhadap tindakan yang radikal. Pemikiran-pemikiran ataupun gagasan-gagasan semacam ini di harapkanakan melahirkan rasa toleransi dan penghargaan yang tinggi terhadap sesama manusia (Faisol 2011).

Pendekatan yang digunakan Abdurrahman Wahid/Gus Dur dalam menampilkan citra Islam ke dalam kehidupan kemasyarakatan adalah pendekatan sosio-kultural. Pendekatan ini mengutamakan sikap mengembangkan pandangan dan perangkat kultural yang dilengkapi oleh upaya membangun sistem kemasyarakatan yang sesuai dengan wawasan budaya yang ingin dicapai. Pendekatan ini lebih mementingkan aktivitas budaya dalam konteks pengembangan lembaga-lembaga yang dapat mendorong transformasi sistem evolutif dan gradual. Pendekatan ini seperti dapat mempermudah masuknya agenda Islam ke dalam agenda nasional bangsa secara inklusifistik (Faisol 2011).

Belajar dari pengalaman hidup seorang Gus Dur, rasanya pendidikan agama dan pendidikan multikultural bisa berjalan seimbang tidak perlu dipertentangkan satu sama lainnya. Pengalaman Gus Dur yang lahir dari pendidikan agama yang kental, baik sejak pesantren di Jawa maupun pengalaman pendidikannya di Mesir, Irak, Baghdad, dan Eropa. Perkembangan intelektual Gus Dur dibentuk oleh pendidikan Islam klasik dan pendidikan Barat modern. Faktor-faktor ini merupakan prasyarat baginya untuk mengembangkan ide-idenya dan telah membuahkan pandangan multikulturalismenya yang kuat (Greg Barton 2016).

Dalam hidup berbangsa, umat Islam perlu saling mengembangkan dialog dan kerjasama dengan umat agama lain. Hanya dengan dialog dan kerjasama inilah yang akan membuat umat Islam terus belajar dan mampu berdampingan dengan umat lain. Kondisi ini menempatkan Islam bukan sebagai alternatif, tetapi sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa (Irwan Suhanda 2010). Bagi Gus Dur semua manusia adalah sama, tidak peduli darimana asal-usulnya, apa jenis kelamin mereka, suku mereka, ras dan kebangsaan mereka. Yang Gus Dur lihat adalah bahwa mereka manusia seperti dirinya dan yang lainnya (Husein Muhammad 2010).

Pemikiran Neo-Modernisme Gus Dur melahirkan begitu banyak konsep-konsep baru dalam tatanan kehidupan beragama salah satunya adalah melalui pendidikan Islam dengan begitu banyak model pengajaran, baik yang berupa pendidikan sekolah, maupun pendidikan non-formal seperti pengajian, arisan dan sebagainya. Tak terhindarkan lagi, keragaman jenis dan corak tersebut terjadi seperti yang kita lihat di tanah air kita dewasa ini. Ketidakmampuan memahami kenyataan ini, yaitu hanya melihat lembaga formal seperti sekolah dan madrasah di tanah air sebagai sebuah institusi pendidikan Islam, dan melupakan sisi non-formal dari pendidikan Islam itu sendiri.

Gus Dur berpendapat bahwa agama Islam mengharuskan keberagaman tanpa menghilangkan eksistensi kultur yang ada. Lembaga lembaga seperti pendidikan Islam harus percaya diri menghadapi tantangan globalisasi dengan kulturenya masing-masing. Kritik-kritik yang melandasi pemikiran Gus Dur mempunyai titik tekan adanya rekonstruksi bahwa kehidupan beragama (Islam) perlu adanya dinamisasi agar sejalan dengan tujuan agama, negara, dan masyarakat yang multikultural (Abuddin Nata 2005).

Dalam hal ini konsep Abdurrahman Wahid dalam hal Islam multikultural. Gus Dur berpandangan bahwa kebhinekaan budaya yang berkonotasi positif dapat diwujudkan dengan beberapa aspek, salah satunya ialah pendidikan. Sebagai tokoh yang digelar bapak Pluralisme-Multikulturalisme, beliau menjelaskan bahwa pendidikan itu harus beragam sesuai dengan kulturenya masing-masing. Pendidikan yang beragam itu bukan menyimpang dari tujuan, melainkan suatu upaya untuk mencapai tujuan pendidikan melalui cara yang beragam. Gus Dur memandang perlunya sikap percaya diri dari individu atas kulturenya masing-masing. Dalam contoh ia menawarkan solusi yang sering dinamakan *pribumisasi Islam*, yakni bagaimana mengintegrasikan Islam dengan budaya lokal, ataupun pendidikan Islam dengan pendidikan lokal. Dari pengertian inilah munculah sikap inklusif, plural, multikultural terhadap individu. Sikap yang demikian merupakan solusi dalam perwujudan masyarakat Indonesia yang multikultur sehingga tindakan rasisme, separatis, maupun konflik-konflik SARA lainnya tidak terjadi lagi.

F. Analisis Neo-Modernisme Terhadap Islam Multikultural Dalam Pemikiran Nurcholish Madjid

Wacana Multikultural menjadi tema penting yang banyak mendapat sorotan dari sejumlah Sarjana Muslim. Hal ini dikarenakan kebudayaan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sentuhan kepercayaan dan agama-agama yang ada dan berkembang di dalamnya. Fakta tersebut nampaknya menjadi fokus utama yang dikembangkan tokoh Neo-Modernis seperti Nurcholish Madjid.

Pengembangan paham pluralisme oleh kalangan Neo-Modernisme sejalan dengan kebijakan politik orde baru sejak awal bermaksud menjadikan agama sebagai faktor integratif bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan Islam dan masyarakat majemuk memiliki argumentasi yang kuat. Menurut Nurcholish Madjid hal itu berangkat dari semangat humanitas dan universalitas Islam. Yang dimaksud dengan semangat humanitas adalah Islam merupakan agama kemanusiaan (*fitrah*) atau dengan kata lain cita-cita Islam sejalan dengan cita-cita manusia pada umumnya. Dan misi Nabi Muhammad adalah mewujudkan rahmat bagi seluruh alam, jadi bukan semata-mata untuk menguntungkan komunitas Islam saja.

Sedangkan pengertian universalitas Islam dapat dilacak dari term *al-Islam* yang berarti pasrah pada Tuhan. Dengan pengertian tersebut menurut Cak Nur, semua agama yang benar bersifat *Al-Islam*. Tafsir *Al-Islam* seperti ini bermuara pada konsep kesatuan kenabian dan kerasulan, yang kemudian dalam urutannya membawa kepada konsep kesatuan umat yang beriman (Ahmad Amir Aziz 1999). Kemajemukan umat manusia adalah kenyataan yang telah menjadi kehendak Tuhan. Jika dalam Kitab Suci disebutkan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal dan menghargai, maka kemajemukan itu meningkat menjadi paham kemajemukan, yaitu suatu sistem nilai yang memandang secara positif-optimis

terhadap kemajemukan itu sendiri, dengan menerimanya sebagai kenyataan dan berbuat sebaik mungkin berdasarkan kenyataan itu.

Kita di negeri ini biasa menyebut bahwa masyarakat Indonesia adalah sebuah masyarakat yang majemuk atau beragam. Dalam pernyataan itu tidak jarang terselip kesan, seolah-olah kemajemukan masyarakat adalah suatu keunikan di kalangan masyarakat-masyarakat yang lain. Dan karena keunikannya, maka masyarakat kita memerlukan perlakuan unik pula, yaitu perlakuan berdasarkan keragaman. Nurcholish Madjid memnungkapkan bahwa pluralitas dan multikultural adalah aturan Tuhan (*sunatullah*) yang tidak dapat diingkari dan barang siapa yang mencoba mengingkari hukum kemajemukan budaya, maka akan timbul fenomena pergolakan yang tidak berkesudahan (Jurnal Jiyanto dan Amirul Eko Efendi 1995).

Dalam menjelaskan fenomena multikultural dalam dimensinya yang luas Nurcholish Madjid acap kali mengkonstatasi ayat-ayat Al-Qur'an bernuansa pluralitas sebagai basis argumentasinya. Di samping itu, dengan sangat luas, Cak Nur memaknai Islam sebagai sikap pasrah sempurna kepada Allah yang berada pula pada garis kelanjutan dengan agama-agama lain, sehingga menurutnya, ber-Islam adalah tetap berusaha dalam kesadaran akan kesatuan asal agama-agama, sehingga wajib bagi seorang Muslim untuk beriman kepada semua nabi, tanpa membedakan antara mereka dan pasrah kepada Allah (Nurcholish Madjid 1994).

Pemahaman Cak Nur terhadap fenomena multikultural dan pluralisme tidak hanya bersifat *co-existence* namun lebih jauh dari itu, yakni bersifat *pro-existence*. Artinya, fenomena multikultural khususnya tidak hanya dipandang sebagai sebuah kenyataan yang sekedar hanya dibiarkan adanya, tetapi merupakan hal yang mesti ditumbuhkan dan dikembangkan eksistensinya dalam rangka kebaikan kehidupan. Cak Nur menyadari fenomena bahwa Indonesia merupakan negara dan bangsa dengan segala dimensinya yang kompleks. Guna memupuk kekuatan besar dan mengentaskan bangsa ini dari krisis moral, Cak Nur mengedepankan tradisi kepemimpinan Nabi Muhammad Saw di Madinah. Cak Nur menyamakan kontrak politik antara komunitas Muslim di Madinah dengan komunitas Yahudi yang kemudian dikenal dengan *Mintaq Madinah* (deklarasi Madinah) dengan Pancasila yang khas menjadi milik bangsa Indonesia.

Baginya, Pancasila merupakan ideology terbuka dan sekaligus memiliki nilai-nilai universal, sehingga mampu menjadi dasar atau landasan bersama. Konsep Pancasila sebagai “kalimatun sawa” ini dikedepankan Cak Nur, karena ia sadar terhadap kondisi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang plural-multikultural dalam segala dimensinya, sangat rentan konflik sosial tersebut akan semakin pekat aroma dan nuansanya manakala unsur agama sedemikian terlibat.

G. Relevansi Konsep Islam Multikultural dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid

Tujuan dari konsep Islam multikultural pada intinya mewujudkan kesadaran akan keberagaman suku, ras, agama, etnis dan gender dalam bangsa Indonesia sehingga mampu melahirkan masyarakat Islam yang toleransi, menghargai dalam kehidupan masyarakat yang heterogen. Kebutuhan konsep Islam multikultural dalam proses tatanan kehidupan merupakan sesuatu yang penting dan berarti. Hal demikian sejalan dengan pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid yang memfokuskan pentingnya masyarakat Islam yang berwawasan multikultural.

Sebagai seorang yang memiliki pemahaman terhadap pemikiran Islam klasik (dunia pesantren) serta dunia Barat (liberal), tidak diragukan Gus Dur dan Cak Nur memiliki berbagai ide progresif untuk memajukan bangsa Indonesia, berikut ide-ide gagasan multikultural keduanya yang dapat di implementasikan dalam kehidupan konsep Islam.

1. Gagasan Pribumisasi Islam.

Gus Dur dalam gagasan ini menyatakan pribumisasi Islam adalah bagian dari sejarah, baik di negeri asalnya maupun di negeri lain, termasuk Indonesia. Yakni penyesuaian ajaran Islam dengan kenyataan hidup (Akhmad Sahal 2016). Gagasan ini dapat diterapkan dalam konsep Islam dengan pemahaman penghargaan budaya sebagai kenyataan hidup dengan tidak membuat polarisasi budaya dengan agama, sinkronisasi kepentingan Islam dengan kepentingan nasional tidak membuat Arabisasi di masyarakat Indonesia akan menunjukkan Islam benar-benar agama yang *rahmatan lil-alamin*.

Pribumisasi Islam bukan suatu upaya meninggalkan norma demi budaya, tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan-kebutuhan dari budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman nas, dengan tetap memberikan peranan kepada usul al-fiqh dan qawa'id al-fiqh (Ainul Fitriah 2013).Intinya, pribumisasi Islam adalah ingin mengakomodasi budaya dan kearifan lokal menjadi bernilai agama, sehingga antara agama dan budaya dapat menyatu dan bersinergi.

2. Prinsip-Prinsip Humanisme dan Pluraritas Masyarakat

Bagi Gus Dur semua manusia adalah sama, tidak peduli darimana asal-usulnya, apa jenis kelamin mereka, suku mereka, ras dan kebangsaan mereka. Yang Gus Dur lihat adalah mereka manusia seperti dirinya dan yang lainnya (Husein Muhammad 2010). Pandangan ini menunjukkan bahwa Gus Dur adalah sosok yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dalam perbedaan, dalam konsep Islam dapat diterapkan kesamaan hak, yakni hak sebagai sesama manusia, sebagai sesama warga negara.

Sedangkan paham pluralisme mampu mengakomodir ragam kemajemukan yang ada di masyarakat, melalui paham ini diharapkan segala perbedaan dapat dipahami sebagai sunnatullah yang dapat melahirkan kebaikan. Pada konteks ini masing-masing masyarakat memiliki nilai-nilai yang diyakini, dipatuhi, dan dilaksanakan demi menjaga harmonisasi dalam masyarakat (Ika Fatmawati Faridah 2013).

3. Prinsip Dasar Pembaharuan Pemikiran Islam dengan Gagasan Universalisme Islam

Pengertian universalisme Islam dapat dilacak dari term Islam yang berarti pasrah terhadap tuhan. Tafsir *al-Islam* seperti ini bermuara pada konsep kesatuan dan kerasulan, yang kemudian dalam urutannya membawa konsep kesatuan umat yang beriman (Ahmad Amir Aziz 1999). Dalam gagasan ini Cak Nur menyerukan semangat persatuan dan kesatuan umat tanpa melihat latar belakang perbedaan, yang dapat diimplementasikan dalam konsep Islam dengan memberikan pemahaman Bhinneka Tunggal Ika.

Islam dalam kerangka universalisme adalah bahwa Islam dapat berlaku bagi semua orang di setiap tempat dan waktu. Dalam ungkapan arab disebut *al- Islam shalih fi kulli zaman wa makan*. Islam universal adalah Islam yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan budaya di mana ia tumbuh dan berkembang. Islam Universal juga berarti ajaran Islam yang mengedepankan kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keterbukaan. Universalisme Islam juga berarti Islam tidak membedakan antara bangsa Arab dan non Arab (¹Laily Nur Arifa 2017).

4. Islam dan Problem Modernitas dalam Gagasan Hak asasi manusia

Gagasan HAM hakikatnya membangun kebebasan manusiawi, termasuk kebebasan berpendapat, keagungan konsep hak asasi manusia melibatkan yang tinggi itu, konon kata Nurcholish Madjid menyebar ke Barat melalui filsafat kemanusiaan Giovanni Pico Pella Mirandolla dan sebagian melalui filsafat John Lock (Nurcholish Madjid 2004). Kesadaran tentang HAM menuntut dan menghayati sebagai bagian dari rasa makna dan tujuan hidupnya. Hal ini juga patut diterapkan dalam dunia pendidikan Islam yang mana pendidikan adalah hak segala bangsa, dan pendidikan Islam menjadi bagian dari salah satu yang menjembatani hidup seseorang.

Dengan menggunakan istilah keagamaan Islam menurut Nurcholis Madjid, iman yang pribadi itu membawa akibat adanya amal soleh yang memasyarakat. Sebab, kebenaran bukanlah semata-mata persoalan kognitif; kebenaran harus mewujudkan diri dalam tindakan. Disini, memancar berbagai keagamaan dan kemasyarakatan yang harus diperankan oleh agama dalam kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan mereka di abad modern ini.

H. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai “Pemikiran Neo-Modernisme Perspektif KH. Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid serta Implikasinya terhadap Islam Multikultural” maka, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pemikiran Neo-Modernisme Perspektif KH. Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid adalah sebagai berikut:
 - a) Pribumisasi Islam, yakni adanya peleburan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal masyarakat, sehingga antara budaya dan agama bisa berjalan selaras dan tidak bertentangan.

- b) Prinsip-prinsip humanisme dan pluralitas masyarakat adalah demokrasi, karena demokrasi merupakan suatu keharusan untuk tidak boleh dilupakan dan diabaikan karena menyangkut tentang kemanusiaan.
- c) Prinsip Dasar Pembaharuan Pemikiran Islam dengan Gagasan Universalisme Islam. Universalisme Islam, yakni menjadikan Islam relevan dengan kondisi dan tempat dimanapun berada, sehingga nilai-nilai Islam bersinergi dengan kearifan lokal dan kebudayaan masyarakat setempat.
- d) Islam dan Problem Modernitas, Cak Nur menegaskan bahwa modernisasi bukanlah penerapan sekularisme, dan bukan pula menggunakan nilai-nilai kebudayaan Barat akan tetapi modernisasi adalah rasionalisasi.

2. Implikasi pemikiran Neo-Modernisme terhadap Islam Multikultural

Dalam hal konsep Islam multikultural. Gus Dur berpandangan bahwa kebhinekaan budaya yang berkonotasi positif dapat diwujudkan dengan beberapa aspek, salah satunya ialah pendidikan. Sebagai tokoh yang digelar bapak Pluralisme-Multikulturalisme, dalam bukunya beliau menjelaskan bahwa pendidikan Islam itu harus beragam sesuai dengan kulturnya masing-masing. Sedangkan Cak Nur dalam pemikirannya mengedepankan tradisi kepemimpinan Nabi Muhammad Saw di Madinah, Cak Nur menyamakan kontrak politik antara komunitas muslim madinah dengan komunitas Yahudi yang kemudian dikenal dengan *Mintaq Madinah* (deklarasi madinah) dengan Pancasila yang khas menjadi milik bangsa Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang difasilitasi oleh Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat LP3M IAIMNU Metro Lampung, serta didanai oleh IAIMNU Metro Lampung. Penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada IAIMNU Metro Lampung.

Daftar Pustaka

- Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).
- Abdul Munif, *Pemikiran Pendidikan Islam Klasik dalam Abdurrahman Assegaf dkk, Pendidikan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2007).
- Aziz, Ahmad Amir. *Neo-Modernisme Islam di Indonesia Gagasan Sentral Nurcholish Madjid Abdurrahman Wahid*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999).
- Baidhawiy, Zakiyuddin. *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Erlangga, 2005).
- Barton, Greg. *Biografi Gus Dur, The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, (Yogyakarta: LKiS, cet IX, 2010).
- , Greg, *The Authorized Biografi of Abdurrahman Wahid*, (Yogyakarta: LKiS, 2016).
- , Greg. Neo-Modernism: A Vital Synthesis of Tradisionalist and Modernist Islamic Thought in Indonesia, *Studia Islamika*, Vol. 2, No. 3, 1995.

- , Greg. "Indonesia's Nurcholish Madjid and Abdurrahman Wahid as Intellectual Ulama: The Meeting of Islamic Traditionalism and Modernism in Neo-Modernist Thought", dalam *Islam and Christian Muslim*, CSIC, Birmington, Vol. 8, No. 3, 1999.
- Budhy Munawar-Rachman, *Membela Kebebasan Beragama*, (The Asia Foundation, 2016),
- Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
- Endang Saifuddin Anshari, *Kritik atas Faham dan Gerakan Pembaharuan Drs. Nurcholish Madjid*, (Bandung: Bulan Sabit, 1973).
- Faridah, Ika Fatmawati. "Toleransi Antarumat Beragama Masyarakat Perumahan". *Jurnal Komunitas*, Vol. 5, No. 1 (Maret, 2013).
- Faisol, *Gus Dur & Pendidikan Islam: Upaya Mengembalikan Esensi Pendidikan di Era Global*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011).
- Fitriah, Ainul. "Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Pribumisasi Islam". *Jurnal Teosofi*, Vol. 3, No. 1 (Juni, 2013).
- H.M. Rasyidi, *Sekularisme dalam Persoalan Lagi: Suatu Koreksi atas Tulisan Drs. Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Jajasan Bangkit, 1972).
- Husein Muhammad, *Pluralisme Gus Dur Gagasan Para Sufi*, (Jakarta: Majalah Cahaya Sufi, 2010).
- Irwan Suhandi (ed), *Gus Dur Santri Par Excellence: Teladan Sang Guru Bangsa*, (Jakarta: Kompas, 2010).
- Jiyanto dan Amirul Eko Efendi, "Implementasi Pendidikan Multikultural di Madrasah Inklusi MAN Maguwoharjo Yogyakarta". *Jurnal Penelitian IAIN Surakarta*. Vol. 10, No. 1, Februari 2016.
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana, 1995).
- Laily Nur Arifa, "Pemikiran Universalisme Islam Nurcholish Madjid Dan Relevansinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Multikultural". *Jurnal al-Wijdan*, Vol. 2, No. 2 (November, 2017).
- Majid, Nurcholis. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1999).
- , Nurcholis. *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, (Jakarta: Paramadina, 1994).
- , Nurcholis. *Islam, Doktrin dan Peradaban; sebuah telaah kritis tentang masalah keimanan, kemanusiaan dan kemoderenan*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992).
- , Nurcholish. *IslamAgamaKemanusiaan*, (Jakarta: Penerbit Paramadina, 2003).
- M. Hanif Dhakiri, *41 Warisan Kebesaran Gus Dur*, (Yogyakarta: LKiS, 2010).
- Munzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990).
- Nata, Abudin. *Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan Islam Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Noeng Muhajir, *Metode Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesa Rasia, 1996).
- R. William Liddle, *Islam, Politik dan Modernisasi*, (Jakarta: SH, 1997).
- Sahal, Akhmad. *Islam Nusantara*, (Bandung: Mizan, 2016).
- Suharini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995).
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).
- Tim INCRS, *Beyond The Symbols: Jejak Antropologis Pemikiran Dan Gerakan Gus Dur* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000)
- Wahid, Abdurrahman. *Muslim di Tengah Pergumulan*, (Jakarta: Lappenas, 1981).

- , Abdurrahman. *"Pribumisasi Islam," dalam Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, (Jakarta: P3M, 1989).
- , Abdurrahman. *Islam Indonesia Menatap Masa Depan, Kata Pengantar M. Dawam Raharjo*, (Jakarta: P3M, 1989).
- , Abdurrahman. *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, (Depok: Desantara, 2001).
- , Abdurrahman. *Tuhan Tidak Perlu Dibela*, (Yogyakarta: Saufa, 2016).
- , Abdurrahman. *"Agama dan Demokrasi", A. Gaffar Karim, Metamorfosis NU dan Politisasi Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 1995).
- Zubaedi, *Islam dan Benturan Antarperadaban, Dialog Filsafat Barat dengan Islam, Dialog Peradaban, dan Dialog Agama*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007)